

# MUNDUS

Jurnal Kajian Internasional

Vol . 2, No. 1 Juni 2005

ISSN : 1829-8508

**Strategi Pengembangan Pertanian dan Agribisnis  
dalam Era Globalisasi Ekonomi (Kasus : Dampak  
Ratifikasi Kesepakatan Uruguay dalam GATT Terhadap  
Sektor Pertanian dan Agribisnis**

*Lutfi Muta'ali*

*How Well-founded Is the International Human Rights Regime?*

*Rima Meilasari*

**Kebijakan Perburuhan Philipina Dalam Melindungi Buruh Migran**

*Ratnawati*

**Upaya Rekonsiliasi Dua Korea Dalam Kerangka CBMs**

*Yuniar Istiyani dan Fauzan*

**Terorisme dan Kebijakan Keamanan Jepang Melawan**

**Terorisme**

*Erna Kurniawati*

**Upaya ASEAN Dalam Menanggulangi Masalah Terorisme  
di Asia Tenggara**

*Aria Aditya Setiawan*

**Interplay Antara Rezim Pembangunan Berkelanjutan Dengan Rezim  
Perdagangan Internasional Dalam WTO**

*Asep Saepudin*

*Humanitarian Intervention on Liberal International and  
Realist Perspectives*

*Antony Lee*



Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
UPN " Veteran " Yogyakarta







# UPAYA REKONSILIASI DUA KOREA DALAM KERANGKA CBMs

Yuniar Istiyani dan Fauzan\*

## Abstract

*Because of the dangerous and complicated constellation of power and interest on and around the Korean Peninsula, it cannot be overlooked that after the armistice agreement that ended the hot phase of the Korean War in 1953, peace could be maintain in Northeast Asia. Facing the uneasy past and serious security concerns, Seoul has intensified its efforts at expanding and enhancing the dialogue with North Korea on various level trying to mitigate the DPRK's relations with the international community and supporting its integration into international networks of commerce and finance.*

**Key Words:** Confidence Building Measures, Reconciliation, Korea

## Pendahuluan

Semenanjung Korea merupakan kawasan yang penuh dengan persoalan militer, ekonomi dan politik. Semenanjung ini merupakan jembatan atau koridor yang strategis antara Cina daratan dan Jepang. Semenanjung ini juga langsung berbatasan dengan daerah industri penting Manchuria (sekarang merupakan bagian dari Cina) yang telah lama menjadi ajang persaingan strategis antara Cina, Jepang dan Rusia. Sejak Perang Korea tahun 1950, persaingan antara pemerintahan Korea Selatan dan Utara mendorong sengketa yang berkelanjutan dalam hal ekonomi dan militer yang berkesinambungan dengan negara-negara tetangganya.

Sejak di bawah kepemimpinan Roh Moo-Hyun, Pemerintah Korea Utara berupaya memperluas dan mengarahkan pandangan kepada rekonsiliasi dan kerjasama antar kedua Korea serta perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahan Roh memperluas dan memperdalam pertukaran

dan kerjasama dengan Korea Utara. Korea Selatan juga meletakkan landasan bagi komunitas yang makmur melalui perluasan dan pembangunan proyek kerjasama ekonomi antar kedua Korea dan menitikberatkan pada perbaikan homogenitas nasional dengan memperluas pertukaran misi sosial dan budaya.<sup>1</sup>

Pemerintahan Korea Selatan yang dipimpin oleh Roh Moo-Hyun mempunyai misi untuk meletakkan landasan bagi terciptanya sebuah era Korea bersatu dan membuat peningkatan dalam hubungan antara Korea Selatan-Korea Utara berdasar atas rekonsiliasi dan kerjasama, kemudian mengatasi ketidakstabilan hubungan keduanya sejak Pertemuan Utara-Selatan pada bulan Juni 2000. Saat pemilihan presiden, Roh berjanji akan melanjutkan dan mengembangkan *Sunshine Policy* yang diadaptasi dari pemerintahan sebelumnya serta meneruskan persetujuan dari pertemuan tahun 2000 tersebut. Label baru

---

\* Yuniar Istiyani adalah alumnus Jurusan Hubungan Internasional FISI UPN "Veteran" Yogyakarta. (Summer\_98@keromail.com). Fauzan adalah Pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta (fauzan\_dj@yahoo.com)

bagi kebijakan Roh adalah *Peace and Prosperity*.

Pemerintahan Roh Moo-Hyun sendiri disebut dengan *Participatory Government* atau Pemerintahan Partisipasi karena Roh ingin membuka pemerintahannya bagi publik dengan memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk lebih dekat dengan presiden. Bahkan dalam pemilihan perdana menteri dan kabinet, Roh memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut menyumbangkan suaranya dalam memilih siapa calon yang paling cocok dan diinginkan oleh rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran terutama menyangkut Korea Utara dan Asia Timur Laut, Pemerintahan Partisipasi mengumumkan pandangannya dalam hal membangun Korea sebagai pusat ekonomi Asia Timur Laut bersama dengan era dimana Asia Timur Laut memegang kendali. Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran berlaku bagi seluruh negara di kawasan Asia Timur Laut bukan hanya di Semenanjung Korea. Hal ini dimaksudkan karena masalah Korea Utara adalah masalah internasional bukan hanya masalah antara dua Korea seperti terlihat dalam krisis yang disebabkan oleh program nuklir Korea Utara atau masyarakat internasional bersama-sama membantu Korea Utara dengan memberikan bantuan ekonomi.

Pemerintahan Roh juga mengembangkan "Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran sebagai pedoman dalam hubungan Korea Selatan-Korea Utara. Kebijakan ini secara resmi menolak keinginan Korea Utara untuk mengembangkan nuklir, sementara itu melanjutkan usahanya melalui bantuan

kemanusiaan, reuni keluarga yang terpisah, pariwisata, dan juga perdagangan. Hasil dari Kebijakan Perdamaian dan Kesejahteraan di bawah kendali Menteri Unifikasi Korea dalam hal perdagangan antar Korea telah meningkat dan mengalami pertumbuhan sebesar US\$670 miliar pertahun.<sup>2</sup> Menteri Unifikasi Korea merencanakan untuk memperluas akses menuju daerah wisata Gunung Geumgang, mengembangkan penanaman modal dalam pembangunan Kompleks Industri Gaeseong dan menggunakan pintu masuk transportasi antar Korea guna kemajuan Republik Korea sebagai poros pusat transportasi di Asia timur Laut. Tujuan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagai jalan bagi perdamaian dan menggantikan persetujuan gencatan senjata dengan persetujuan perdamaian. Bagaimanapun juga pelaksanaan sepenuhnya dari kebijakan ini dinyatakan untuk menyelesaikan masalah nuklir di Korea Utara.

Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran merupakan strategi pengembangan nasional yang komprehensif meliputi masalah akan reunifikasi, politik luar negeri dan keamanan. Bukan hanya bidang ekonomi yang menjadi target namun juga bidang militer terutama sektor keamanan, kebijakan ini mencakup pendekatan yang seimbang antara perdamaian dan kemakmuran.

Secara garis besar tujuan jangka pendek dari Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran adalah meningkatkan kerjasama, menumbuhkan sikap saling percaya dalam bidang militer antar kedua Korea dan menciptakan situasi perdamaian di Semenanjung Korea dengan mendukung normalisasi hubungan antara Korea Utara



dengan Amerika Serikat juga Jepang. Hal ini akan menjadi batu pijakan bagi tercapainya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai yaitu pencapaian kemakmuran, membangun fondasi yang kokoh bagi terlaksananya reunifikasi damai dan mengembangkan Semenanjung Korea sebagai poros ekonomi di Asia Timur Laut.

Kebijakan dari Pemerintahan Partisipasi yang dijalankan oleh pemerintahan Roh Moo-Hyun yaitu Perdamaian dan Kemakmuran bertujuan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dengan damai melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintahan Roh bertujuan membangun keadaan damai di Semenanjung Korea dengan meningkatkan kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara, mempromosikan *military confidence* dan mendukung normalisasi hubungan antara Korea Utara-Amerika Serikat juga hubungan Korea Utara-Jepang. Kemudian dengan mempromosikan kesejahteraan antara Korea Selatan dan Korea Utara serta membangun sebuah basis untuk unifikasi yang damai. Harapan dari pemerintahan Rakyat ini juga membangun sebuah landasan untuk terciptanya poros ekonomi di Asia Timur Laut.

Dengan latar belakang masalah di atas, tulisan ini akan mengangkat mengenai masalah bagaimana upaya Roh Moo Hyun dalam mendorong rekonsiliasi Korea Selatan terhadap Korea Utara? Argumen tulisan ini adalah, upaya rekonsiliasi melalui kebijakan Perdamaian dan kemakmuran dilakukan dengan mengembangkan *Confidence Building Measures* antara kedua belah pihak. Argumen itu akan dipaparkan dalam tiga

bagian; konsep rekonsiliasi, upaya rekonsiliasi dan CBMs di semenanjung Korea

### Konsep Rekonsiliasi

Rekonsiliasi hanya merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam suatu negara ataupun antara negara yang sedang bertikai. Rekonsiliasi dalam terminologi politik sering dipahami sebagai pertemuan untuk menjalin kesepahaman guna mewujudkan perdamaian. Dengan kata lain, rekonsiliasi dimungkinkan jika sebelumnya memang terjadi konflik dalam persaingan politik. Rekonsiliasi mengacu pada proses jangka panjang untuk mengatasi rasa permusuhan dan rasa saling tidak percaya di antara dua bangsa yang terpisah.<sup>3</sup> Menurut Simon Fisher, rekonsiliasi merupakan suatu proses tetapi sekaligus sasaran. Rekonsiliasi adalah jalan yang dipilih oleh setiap masyarakat untuk mempertemukan konsep-konsep kebenaran, belas kasihan dan keadilan setelah terjadinya kekerasan. Rekonsiliasi tidak akan terjadi dalam satu malam, partisipasi aktif oleh masyarakat yang terkena dampaknya akan sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan dalam pencapaian perdamaian.<sup>4</sup>

Seperti halnya rekonsiliasi yang ingin dicapai oleh kedua Korea untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Rekonsiliasi yang terjadi antara kedua Korea diharapkan dapat mengatasi rasa permusuhan dan saling mencurigai antara keduanya. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mempertemukan dan menjalin kesepahaman guna mewujudkan perdamaian. Perdamaian yang ingin dicapai oleh Korea Selatan dalam hubungannya dengan Korea Utara meliputi

*harmony, respect, well-being, dan unity.* Tindakan konkret yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintahan Roh dengan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran terkait dengan keharmonisan, respek, kesatuan, dan kesejahteraan misalnya pemberian bantuan kemanusiaan, pertemuan tingkat menteri yang membahas tentang masalah ekonomi, pembicaraan militer dan lain-lain.

### Upaya Rekonsiliasi Dua Korea

Keharmonisan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam upaya mencapai perdamaian yaitu mencakup usaha mendorong kesamaan kepentingan kedua Korea. Kesamaan kepentingan tersebut adalah menciptakan perdamaian dalam rangka reunifikasi. Usaha yang dilakukan Korea Selatan pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun dengan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran yaitu misalnya dengan menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara melalui dialog. Dialog tersebut lebih dikenal dengan *Six Party Talks*. Negara-negara yang ikut serta dalam *Six Party Talks* tersebut adalah kedua Korea yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Mereka semua bersama-sama berusaha menciptakan visi yang sama bahwa stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan. Atas alasan ini, negara-negara tersebut mendukung usaha dan kebijakan yang diambil pemerintah Korea Selatan dalam hal penyelesaian masalah Korea Utara.

Selain *Six Party Talks*, pembicaraan-pembicaraan antar kedua Korea terus dilakukan. Jumlah dari dialog-dialog yang dilakukan telah meningkat dan topik

pembicaraan juga diperluas. Untuk tingkat menteri contohnya di bidang ekonomi yaitu dengan Pertemuan Konsultatif Tingkat Pelaksana dalam hal: kerjasama elektrik, pencegahan bahaya banjir di Sungai Yimjin, penghubungan kembali jalan dan rel kereta api, konstruksi Kompleks Industri Gaeseong, dasar institusi bagi kerjasama ekonomi, terkait dengan pembayaran (*clearing settlement*), dan terkait dengan kandungan sebuah produk (*origin certification*).<sup>5</sup> Sedangkan di bidang sosial Korea Selatan memiliki Komite untuk Kerjasama Sosial dan Kebudayaan dengan Korea Utara. Dialog di bidang kemanusiaan diwakili oleh Palang Merah kedua negara. Dialog yang dilakukan di bidang militer dihadiri oleh menteri pertahanan kedua Korea yaitu Pembicaraan Militer Tingkat Pelaksana dan Pembicaraan Militer Tingkat Jenderal. Dalam Pembicaraan Militer Tingkat Jenderal terdapat Kontak Tingkat Pelaksana bagi Pembicaraan Militer Tingkat Jenderal.<sup>6</sup> Pembicaraan antar Korea tersebut telah dirintis oleh presiden-presiden sebelum Roh Moo-Hyun.

Pemerintahan Roh melalui Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran, berusaha untuk memenuhi kesejahteraan rakyat Korea Utara yaitu di bidang ekonomi dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi sendiri, pemerintahan Roh mempercepat tiga proyek ekonomi besar yaitu: pembangunan dari *Gaeseong Industrial Complex*, menghubungkan kembali jalan kereta api dan jalan antar kedua Korea dan pengembangan kawasan wisata Gunung Geumgang. Di bidang kemanusiaan, pemerintahan Roh pada tahun 2003 menyediakan 300 ribu ton pupuk dan 400 ribu ton makanan bagi Korea Utara. Kemudian juga berpartisipasi dalam usaha yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membantu Korea Utara



dengan menyediakan 100 ribu ton jagung dan ikut ambil bagian bersama WHO serta UNICEF.<sup>7</sup>

Upacara pembangunan *Gaeseong Industrial Complex* dengan luas area 33 km<sup>2</sup> diadakan pada tanggal 30 Juni 2003.<sup>8</sup> Kedua Korea akan bekerjasama membangun sebuah kawasan perekonomian internasional dengan total luas area 65,7 km<sup>2</sup>. Pembangunan *Gaeseong Industrial Complex* merupakan kombinasi antara kepemilikan modal dan teknologi dari Korea Selatan, sedangkan area dan pekerja dari Korea Utara. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan perusahaan Korea Selatan terutama berkaitan dengan beban biaya produksi yang tinggi dan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi Korea Utara. Bagi Korea Utara *Gaeseong Industrial Complex* merupakan *buffer zone* dan bila perkembangan komplek industri ini berhasil, maka akan menjadi titik awal bagi keterbukaan dan perubahan di Korea Utara. Hal ini juga akan menguatkan homogenitas masyarakat kedua Korea dan mengurangi rasa permusuhan kepada Korea Selatan.

Kompleks industri ini merupakan simbol dari rekonsiliasi dan kerjasama kedua Korea juga menjadi batu pijakan menuju unifikasi dimana masyarakat antar kedua Korea dapat saling bekerjasama, memperluas ruang lingkup dalam hal memahami satu sama lain. Mempromosikan kerjasama ekonomi antar kedua Korea akan mendorong dalam hal mengurangi ketegangan militer, mendukung perdamaian di Semenanjung Korea dan menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Diharapkan kompleks industri ini akan membantu mempersingkat dialog antar kedua Korea dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mencari solusi yang

tepat bagi permasalahan nuklir Korea Utara. Pengembangan kompleks industri ini merupakan proyek paling penting di bawah Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran dan proyek saling menguntungkan yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan bersama kedua Korea seperti halnya proyek perdamaian sebagai upaya keluar dari pengaruh Perang Dingin melalui kegiatan ekonomi. Jalan kereta api antara kedua Korea sedang dihubungkan kembali, upacara pembukaan terhadap usaha tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2003. Persiapan untuk pembukaan termasuk menghubungkannya sinyal jalan dan sistem listrik juga pengelola untuk pengoperasian kereta. Pembukaan jalan kereta api untuk menghubungkan kedua Korea akan berfungsi sebagai jaringan infrastruktur fisik dalam mendukung pertukaran perdagangan dalam jumlah besar juga kerjasama antara kedua Korea. Langkah selanjutnya adalah dengan menghubungkan jalan antar benua misalnya *Trans-Siberian*, *Trans-China* dan lain-lain. Hal ini dalam rangka untuk mendukung keinginan Korea sebagai poros Asia Timur Laut.

Bantuan Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam bidang kemanusiaan selain pemberian pupuk, jagung dan beras juga mencoba menyelesaikan permasalahan tentang keluarga yang terpisah. Kedua Korea mengadakan Reuni Keluarga Terpisah ke-8 pada tanggal 20-25 September 2003 di Gunung Geumgang. Total sebanyak 8.051 anggota keluarga telah ikut serta dalam Reuni keluarga terpisah ke-8 sejak Pertemuan Tingkat Tinggi antara kedua Korea pada tahun 2000.<sup>9</sup> Pendirian tempat bagi reuni keluarga terpisah sedang dipromosikan dalam usaha menyediakan lembaga dan kunjungan secara berkala dari

keluarga terpisah baik dari Korea Utara maupun Korea Selatan. Pada tanggal 6 November, kedua Korea bersepakat untuk membangun sebuah tempat reuni dengan total area 20.000 meter persegi di wilayah Gunung Geumgang (Daerah Gosung, Propinsi Gangwon, Korea Utara).

Korea Selatan berusaha untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Korea Utara dengan cara: mendesak Korea Utara untuk mengembalikan tahanan perang dan orang-orang yang telah diculik dan ikut membantu rakyat Korea Utara yang tidak mampu untuk dapat tinggal di Korea Selatan. Usaha yang sebelumnya telah dirintis oleh Presiden Kim Dae-Jung yaitu mendirikan tempat penampungan bagi pelarian Korea Utara ke Korea Selatan di Ansong, Propinsi Kyonggi, walaupun hingga kini hanya mampu menampung 400 orang sementara yang menunggu ribuan orang.<sup>10</sup> Di penampungan tersebut, para pelarian mendapatkan bantuan finansial sebagai modal awal untuk hidup di Korea Selatan. Para pelarian tersebut diajari cara hidup dalam masyarakat kapitalis misalnya bagaimana berbelanja ke pasar, berurusan dengan bank dan lain-lain.

Korea Selatan memperlakukan Korea Utara sebagai negara yang berdaulat hal ini dapat dilihat dari pernyataan Korea Selatan bahwa lebih memilih jalan damai yaitu dengan dialog dibandingkan jalan kekerasan. Setiap dialog ataupun pembicaraan yang dilakukan kedua Korea dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika Korea Utara mengusulkan untuk mengadakan Pembicaraan Tingkat Pelaksana atas bahasan akan penghubungan kembali jalan raya dan jalur kereta api serta

usaha pencegahan banjir di Sungai Yimjin diadakan di Gaeseong pada awal April 2004. Pemerintah Korea Selatan menanggapi hal tersebut dan menyetujui usulan Korea Utara tersebut untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 8-10 April 2004. Contoh lainnya adalah saat Korea Utara mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan ataupun pertemuan kedua Palang Merah Korea atas bahasan mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, kemudian Korea Utara mengusulkan tentang pertemuan yang membahas keikutsertaan kedua Korea dalam *Olympic Games* untuk dapat berjalan bersama sebagai satu tim di acara pembukaan juga penutupan pertandingan tersebut.<sup>11</sup> Semua usulan Korea Utara diterima dan ditanggapi dengan baik oleh Korea Selatan serta pembicaraan-pembicaraan tersebut semakin menguatkan hubungan antara kedua Korea tersebut.

Usulan-usulan baik dari Korea Utara maupun dari Korea Selatan diutarakan melalui surat dan juga telepon sebagai jalur komunikasi antara keduanya. Misalnya kepala delegasi dari Korea Selatan saat diadakannya *The 9th Ministerial Talks*, Jeong Se-Hyeon, mengirimkan surat ke Korea Utara yaitu kepada Kim Yeong-Seong. Isi dari surat tersebut adalah usulan Korea Selatan untuk mengadakan pertemuan tersebut di Seoul pada tanggal 14-17 Januari. Hal ini membuktikan bahwa Korea Selatan memandang Korea Utara sebagai negara yang berdaulat dengan tidak memaksakan kehendaknya dan memutuskan semua keputusan sendiri. Korea Utara selalu diikutsertakan dan didengar pendapatnya dalam segala hal misalnya menentukan tempat, waktu dan agenda yang ingin dibicarakan, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan nuklir sendiri.



Sebagai bagian dari masyarakat internasional, pemerintah Korea Selatan juga mengangkat masalah Korea Utara tersebut ke pertemuan tingkat tinggi internasional seperti dalam APEC di Chili. KTT APEC yang diadakan pada tanggal 20-21 November 2004 dijadikan momentum oleh Roh Moo-Hyun untuk mencari dukungan internasional bagi penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara serta meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. Komitmen awal dari pemerintah Korea Selatan adalah menggunakan jalan damai untuk dapat menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dan menghormati Korea Utara sebagai negara yang berdaulat dapat terlihat dari contoh di atas. Oleh karena isu akan kedaulatan sensitif, maka Korea Selatan berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan terhadap Korea Utara termasuk menyangkut permasalahan nuklir Korea Utara tanpa mengganggu kedaulatan Korea Utara.

Usaha Korea Selatan dalam menempatkan Korea Utara sebagai satu bangsa antara lain dengan cara: penyatuan kembali keluarga terpisah, pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan kedua Korea dan mengembangkan kegiatan pariwisata serta keikutsertaan kedua Korea dalam *Olympic Games* tahun lalu yang hanya menggunakan nama Korea. Penyatuan kembali keluarga yang terpisah dapat dimasukkan ke dalam usaha menempatkan Korea Utara sebagai satu bangsa dengan Korea Selatan karena keduanya mempunyai akar budaya yang sama. Dahulu Korea adalah satu namun karena adanya peristiwa Perang Korea, keduanya menjadi dua negara yang saling bermusuhan. Kini keadaan keduanya saling bertolak belakang baik dalam hal ideologi maupun kehidupan

sosialnya. Sejak Perang Korea tersebut, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena adanya pemisahan kedua Korea. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan berusaha untuk menyatukan keluarga yang terpisah tersebut karena mereka adalah satu bangsa.

Berdasarkan hal tersebut bahwa mereka adalah satu bangsa yang masih mempergunakan bahasa yang sama pula, pemerintah Korea Selatan menggalakkan pertukaran budaya antara keduanya. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, pertukaran dan kerja sama dilakukan, namun juga dalam bidang kesenian maupun budaya. Pertukaran budaya tersebut misalnya pendirian *Gaeseong Living Art* yang digunakan untuk penjualan 1000 macam ketel setelah sebelumnya dipamerkan. Pameran tersebut dihadiri oleh masing-masing delegasi kebudayaan Korea Selatan dan Korea Utara.<sup>12</sup> Pembangunan jalan yang menghubungkan kedua Korea juga akan sangat membantu dalam memperlancar pertukaran kebudayaan tersebut. Adanya jalur transportasi yang menjembatani kedua Korea kembali juga akan mempermudah bagi keluar masuknya kendaraan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang dikembangkan di Gunung Geumgang akan memperkuat tali persaudaraan antara orang-orang Korea. Bukan hanya di Gunung Geumgang, kawasan Gaeseong juga ditujukan bagi kegiatan pariwisata karena dahulu merupakan ibukota dari Korea semasa Dinasti Goryeo (918-1392).

Korea adalah satu bangsa telah dilakukan ketika atlet-atlet dari Korea Selatan dan Korea Utara berjalan bersama dalam acara pembukaan maupun penutupan *Olympic Games* tahun lalu. Pemakaian nama Korea

Games tahun lalu. Pemakaian nama Korea sebagai identitas mereka, menandakan bahwa telah tumbuh kesadaran di masing-masing rakyat Korea bahwa mereka adalah satu. Olimpiade yang akan datang yaitu pada tahun 2008 akan diadakan di Beijing, membawa harapan baru bagi hubungan kedua Korea terutama berkaitan dengan usulan mereka akan berada sebagai satu tim. Hal itu tercetus ketika Komite Olimpiade kedua negara bertemu pada tanggal 25 Februari 2004 saat membicarakan persetujuan berjalan bersama saat acara pembukaan dan penutupan Olimpiade di Yunani tahun lalu.

Pemerintah Roh berusaha membangun kerangka perdamaian di Semenanjung Korea dengan institusionalisasi perdamaian melalui peningkatan hubungan antar orang Korea. Sesuai dengan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran, Korea Selatan akan meletakkan landasan bagi komunitas yang makmur melalui perluasan dan pembangunan proyek kerjasama serta menitikberatkan pada perbaikan homogenitas nasional dengan memperluas misi pertukaran sosial dan budaya.

#### **Pengembangan *Confidence Building Measures* di Semenanjung Korea**

Menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dapat didefinisikan sebagai transisi dari keadaan gencatan senjata menuju keadaan damai. Adanya perubahan karakter di Semenanjung Korea yang telah terbentuk selama 50 tahun dan perkembangan lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan, membuat hubungan luar negeri kedua Korea juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, Pemerintahan Roh Moo-Hyun percaya bahwa membangun perdamaian akan memungkinkan kedua

Korea untuk dapat hidup bersama dalam kemakmuran sebagai dasar menjadikan Korea poros ekonomi di Asia Timur Laut.

Untuk mewujudkan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran, pemerintah Korea Selatan akan membangun kedamaian dalam rangka menghilangkan ancaman terhadap keamanan dan kemungkinan timbulnya perang di Semenanjung Korea. Dalam mencapai hal ini, pemerintah Korea Selatan berencana mendukung kegiatan yang diperlukan untuk membangun kepercayaan antara dua Korea terutama dalam hal permasalahan militer karena merupakan permasalahan yang paling penting berkaitan dengan penciptaan perdamaian di Semenanjung Korea. Walaupun Korea Utara tetap berpegang teguh pada kepercayaan bahwa diskusi tentang membangun kepercayaan dalam hal militer adalah sia-sia sampai gencatan senjata digantikan dengan perjanjian damai. Korea Utara berpendapat bahwa permasalahan militer di Semenanjung Korea adalah permasalahan antara Korea Utara-Amerika Serikat di mana Korea Selatan tidak terkait. Terlebih lagi Korea Utara menyatakan bahwa kepercayaan antara kedua Korea dapat diwujudkan secara alami dengan pengurangan senjata.

*Confidence Building Measures* (CBMs) adalah upaya untuk menciptakan saling pengertian antar negara sehingga langkah-langkah untuk memperteguh keamanan melalui peningkatan kemampuan pertahanan suatu negara tidak akan dianggap sebagai ancaman terhadap negara lain. Definisi dan konsep CBMs beraneka ragam, mulai dari yang paling sempit dan hanya menitikberatkan pada dimensi pertahanan (militer) hingga usaha-usaha yang lebih luas untuk menciptakan saling



bangsa. Pendek kata CBMs adalah setiap upaya untuk menghindari ketegangan dan kemungkinan konflik antar negara yang dilakukan secara formal maupun non formal melalui cara unilateral, bilateral maupun multilateral.<sup>13</sup>

CBMs sering dideskripsikan sebagai bisnis yang paling cepat berkembang selama era pasca Perang Dingin. CBMs disebut sebagai instrument yang sangat berguna dalam mencegah terjadinya perang, *arms control*, dan perjanjian damai serta memfasilitasi resolusi konflik. CBMs juga dapat diterapkan di setiap negara, mempermudah dalam hal negosiasi dan membawa banyak keuntungan. Secara luas, CBMs dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu dapat berupa tindakan ataupun prosedur yang dilakukan baik secara unilateral, bilateral maupun multilateral guna mengurangi ketegangan militer yang terjadi antara negara sebelum, saat dan setelah terjadi konflik. Area pendekatan dalam CBMs atau disebut *CBMs Tools* terdiri dari empat hal yaitu:

- *Communication channels* yaitu mengurangi ketegangan antara negara yang berkonflik dilakukan melalui jalur komunikasi. Contohnya seperti adanya *hotline* yang tercipta antara Washington dan Moskow setelah terjadinya Krisis Misil Kuba;
- *Constraint measures* yaitu berkaitan dengan menjaga kekuatan militer suatu negara tetap berada dalam kawasan perbatasan;
- *Transparency measures* yaitu adanya keterbukaan akan aktifitas dan kemampuan militer suatu negara. *Nuclear transparency* juga termasuk di dalamnya;
- *Verification measures* yaitu berkaitan dalam hal mengkonfirmasi atau memperjelas persetujuan suatu negara dalam sebuah perjanjian.

Tujuan dari CBMs sendiri adalah untuk

mengurangi ketegangan dan juga kecurigaan, mengurangi resiko terjadinya konflik bersenjata baik terjadi karena kesalahpahaman ataupun sebuah akibat; membangun komunikasi dan kerjasama dalam rangka mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata, meningkatkan pemahaman akan isu pentingnya keamanan dan pertahanan bersama terutama dalam satu kawasan ataupun antara dua negara.

Terkait dengan Semenanjung Korea, Korea Utara tetap menjadi ancaman utama bagi stabilitas dan keamanan di Asia Timur Laut serta paling mungkin terlibat perang dalam skala besar dengan Amerika Serikat. Korea Utara dengan jumlah penduduk kurang lebih 22,7 juta jiwa, memiliki kekuatan militer lebih dari 1 juta anggota tentara aktif dan 4,7 juta militer cadangan. Orientasi "*Military First*" selalu menjadi jiwa bagi rejim Kim karena dengan hal tersebut kelangsungan rejim dapat tercapai. Kekuatan militer Korea Utara tetap tumbuh baik secara konvensional maupun asimetrik. Militer Korea Utara menyediakan penangkalan, pertahanan dan ancaman penyerangan terbesar yang mempengaruhi terhadap negosiasi internasional.

Struktur kekuatan militer Korea Utara termasuk 19 kesatuan angkatan bersenjata dan tentara infantri yang dilengkapi persenjataan; peningkatan termasuk didalamnya pasukan khusus dan sejumlah artileri, roket dan peluru kendali (dilaporkan di antaranya mampu membawa bahan kimia dan biologi). Angkatan Bersenjata Korea Utara diperkirakan lebih dari 1.170.000 tentara yang terdiri atas Angkatan Laut 60.000 tentara patroli di laut dan di sekitar pantai, memiliki 100 buah kapal selam dan 66 buah kapal di dekat pantai yang

66 buah kapal di dekat pantai yang diperuntukkan bagi pasukan khusus. Sedangkan Angkatan Udara 110.000 tentara dan memiliki 830 pesawat tempur buatan Rusia dan 330 helikopter. Angkatan Darat sebanyak 1.000.000 tentara dan memiliki 3.700 tank.<sup>14</sup>

Korea Utara juga berkonsentrasi pada senjata pemusnah massal yang diperkirakan mampu untuk mengembangkan daya ledak nuklir yang belum sempurna dan jumlah plutonium yang belum mencukupi untuk menyempurnakan senjata ini. Korea Utara juga dipercayai sedang berusaha meningkatkan impor bahan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan uranium. Dalam hal senjata biologi, Korea Utara dipercaya memiliki 13 jenis bakteri termasuk *anthrax*, cacar dan kolera. Sedangkan berkaitan dengan senjata kimia, Korea Utara telah memproduksi lebih dari 10 macam senjata kimia misalnya yang dapat mengganggu fungsi syaraf, menyebabkan luka bakar dan lain-lain. Sekitar 2500 sampai 5000 ton dari senjata kimia ini diperkirakan disimpan dalam 6 tempat berbeda.<sup>15</sup>

Sementara itu, Korea Utara telah memiliki rudal *Scud B* dan *C* dengan jarak tempuh maksimal yaitu sekitar 300 – 500 km, daerah yang menjadi ancamannya adalah untuk *Scud B* daerah Daejeon sedangkan *Scud C* daerah Laut Selatan. Rudal *Rodong 1* dengan jarak tempuhnya lebih dari 1300 km mengancam daerah Okinawa. *Daepodong-1* dengan jarak tempuh 2000 km digunakan sebagai peluncur satelit pada bulan Agustus 1998 dikhawatirkan mengancam negara Jepang atau Taiwan, sedangkan *Daepodong-2* dengan jarak tempuh 6000 km sedang dalam pengembangan menjadi ancaman bagi daerah Alaska.<sup>16</sup> Peningkatan persenjataan

juga berlaku bagi senjata artelery sekitar 170 mm dan 240 mm untuk menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap Seoul. Korea Utara juga terus melakukan pembangunan militer dengan memproduksi tank *Chonmaho* dan kapal selam *Shark*.

Secara singkat, kemampuan dan keadaan militer Korea Utara tidak mengalami perubahan. Korea Utara tetap melanjutkan untuk mengintensifkan doktrin di bawah slogan "*Military First Policy*" dan mempertahankan alat-alat berat militer. Termasuk juga menitikberatkan pengembangan terhadap program senjata pemusnah massal, peningkatan militer dan meningkatkan kesiapan dalam segala bidang. Satu tujuan dengan jelas telah disampaikan oleh rejim yang berkuasa di Korea Utara selama beberapa dekade terakhir yang kemudian dapat menerangkan perilaku Korea Utara akhir-akhir ini yaitu untuk mencapai "*complete, verifiable and irreversible security assurance*"<sup>17</sup>

Dalam rangka menciptakan sebuah perdamaian di Semenanjung Korea sebagaimana yang ingin dicapai melalui Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran, Korea Selatan perlu meningkatkan kemampuan pertahanannya. Hal ini terkait dengan kelanjutan konfrontasi militer antara kedua Korea terutama mengenai kemungkinan serangan militer Korea Utara. Selama masa pencapaian strategi keamanan nasional dengan aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat sebagai pusatnya, militer Korea Selatan tidak dapat menghindari ketergantungan terhadap kekuatan militer Amerika Serikat di Korea. Sebagian masyarakat yang menyadari hal ini telah meningkatkan perhatian terhadap kelemahan politik dan militer Korea Selatan.



mendapatkan kembali kepercayaan publik, pemerintah Korea Selatan perlu memperhatikan asas Pertahanan Mandiri (*Self-Reliant Defense*). Dengan melakukan hal tersebut, Korea Selatan dapat merespon secara aktif atas perubahan dalam aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat dan berperan penting dalam hubungan antar Korea.

Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah Korea Selatan perlu untuk mengatasi ketidakmampuan militernya *vis-a-vis* Korea Utara dalam rangka kekuatan otonomnya. Kemudian juga mengatur militernya dengan peraturan yang lebih efisien dan secara rasional seperti hal-hal penting sebagai improvisasi dari sistem komando yang dikombinasi dalam aliansi sebagai antisipasi dari perubahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Berkaitan erat dengan ancaman keamanan selain dari Korea Utara, kemampuan pertahanan mandiri harus membentuk dasar di mana ancaman ini ditujukan bersamaan dengan adanya aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat dan bekerjasama dengan negara-negara tetangga. Untuk mematangkan hubungan aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat harus secara bertahap membuat rencana untuk kedua pihak: Korea Selatan akan berperan penting dalam hal bertahan atas serangan Korea Utara dengan Amerika Serikat sebagai penyokongnya, Amerika Serikat juga akan berperan sebagai penyeimbang di kawasan tersebut. Selama pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat-Korea Selatan yang dilaksanakan pada bulan November 2004, presiden kedua negara menggarisbawahi kesempatan yang disediakan oleh pertumbuhan kekuatan nasional Korea Selatan untuk melanjutkan perluasan

peraturan dalam Angkatan Bersenjata Korea Selatan.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka pertahanan di Semenanjung Korea. Secara singkat, pertahanan mandiri tidak diartikan sebagai penarikan pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan atau melemahnya hubungan aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara bahwa dengan mengembangkan program senjata nuklir tidak akan membawa keuntungan apapun, sebagai balasannya Pemerintah Korea Selatan serta masyarakat internasional akan mendukung sepenuhnya jika Korea Utara mau untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab.<sup>19</sup> Dengan kata lain, Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk memilih antara program nuklir atau perkembangan ekonominya. Pemerintah Korea Selatan juga melihat pentingnya pada kondisi seperti ini untuk tetap melanjutkan dialog dan usaha mencegah meningkatnya ketegangan antara keduanya.

Kebijakan militer yang berlaku bagi Korea Utara adalah bahwa pemerintahan Roh akan menjalankan CBMs sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan militer antara keduanya. Angkatan Bersenjata Korea Selatan berusaha semaksimal mungkin menggunakan jalur diplomatik misalnya dengan adanya saling kunjungan pejabat tingkat tinggi militer, pertemuan *working level defense policy*, konsultasi akan kebijakan keamanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran, Angkatan Bersenjata Korea Selatan secara aktif mendukung usaha bagi proyek pertukaran dan kerjasama antara Korea Selatan - Korea Utara juga berusaha untuk berkomunikasi dan berhubungan

untuk berkomunikasi dan berhubungan yang berkaitan dengan membangun kepercayaan militer dan mengurangi ketegangan militer. Sebagai contohnya adalah pembangunan kembali proyek Gyeongui (Seoul-Sinuiju) dan jalur kereta api Donghae bukan hanya simbol nasionalis semata namun merupakan langkah awal dalam membangun infrastruktur secara fisik guna mencapai kerjasama dan pertukaran yang lebih luas antara kedua Korea.<sup>20</sup>

Saluran komunikasi merupakan salah satu bagian dari CBMs yang dapat menurunkan ketegangan antara pihak-pihak bertikai. Menumbuhkan kepercayaan dalam bidang militer terutama dalam hal komunikasi antara kedua Korea misalnya dengan terciptanya *hotline*. *Hotline* militer kedua Korea dibuka di daerah Gyeongui pada tanggal 24 September 2002 kemudian keduanya setuju untuk membuka *hotline* yang kedua di Donghae pada tanggal 5 Desember 2003.<sup>21</sup> Dengan melaksanakan hal tersebut, jaringan komunikasi antara kedua Korea terutama dalam bidang militer telah lengkap sesuai dengan kesepakatan jaminan militer atas pembangunan jalur kereta api dan jalan. *Hotline* militer antara kedua Korea terdiri dari satu jalur telepon dan satu jalur faksimili yang dipasang dengan kabel. Kabel tersebut menghubungkan dua kotak terminal di kawasan sejauh kurang lebih 250 km dari Utara dan Selatan. *Hotline* tersebut secara bersama dikontrol di kawasan Donghae. Adanya *hotline* dapat membantu dalam hal memajukan komunikasi antara pihak lawan dan mencegah krisis.

Selain *hotline*, upaya komunikasi yang dilakukan oleh kedua Korea adalah mengadakan pembicaraan tingkat jenderal militer antara kedua negara. Pembicaraan

pertama kali dilakukan pada tanggal 26 Mei 2004 di Gunung Geumgang. Dalam pembicaraan tersebut, kedua belah pihak saling mengutarakan pendapatnya. Pihak Korea Selatan menekankan terhadap pencegahan kecelakaan tabrakan kapal laut di Laut Barat, sedangkan Korea Utara berargumentasi bahwa pertama kedua pihak harus mendiskusikan cara-cara untuk menghentikan propaganda di area gencatan senjata.<sup>22</sup> Pembicaraan ini berakhir tanpa ada *press release* dan keduanya hanya menyetujui mengadakan putaran berikutnya di Gunung Seorak, Korea Selatan, pada tanggal 3 Juni untuk membahas masalah lain serta menjalin konsultasi di pembicaraan berikutnya.

Putaran kedua dari pembicaraan tingkat jenderal ini diadakan tanggal 3-4 Juni 2004. Dalam pembicaraan ini, kedua Korea mengumumkan sebuah persetujuan yang berisikan empat artikel tentang usaha pencegahan bagi adanya kecelakaan tabrakan kapal laut di Laut Barat, menghentikan kegiatan-kegiatan propaganda di kawasan DMZ, menghilangkan alat-alat yang digunakan untuk propaganda dan lain-lain. Inti dalam pembicaraan tersebut antara lain: menjadikan upaya kerjasama untuk meringankan ketegangan militer dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea; mencegah terjadinya tabrakan kapal laut di Laut Barat, upaya lebih lanjut akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2004; melakukan pengawasan ketat terhadap perahu-perahu untuk mencegah terjadinya konfrontasi; menghentikan kegiatan-kegiatan propaganda dan menghilangkan alat-alat propaganda di wilayah DMZ; dan pertukaran informasi tentang pergerakan kapal-kapal nelayan penangkap ikan ilegal.<sup>23</sup>

Selain itu, kedua Korea juga menyetujui



yaitu 156,8 MHz dan 156,6 MHz. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah kapal-kapal terlibat konflik antara satu sama lain dan juga menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang demikian akan membantu terciptanya keterbukaan dan transparansi yang merupakan bagian penting dalam menumbuhkan saling percaya antara pihak yang bertikai.

*Constraint measures* misalnya usaha membatasi jumlah personil, peralatan serta agar masing-masing angkatan bersenjata negara saling berjauhan satu sama lain misalnya saja di perbatasan. Daerah rawan yang menjadi perhatian antara kedua Korea adalah DMZ. Pasukan Korea Utara dibantu pasukan Amerika Serikat saling berhadapan dengan pasukan Korea Utara di daerah perbatasan ini. Selain itu DMZ juga dijaga oleh UNC. Berkaitan dengan peningkatan kepercayaan dalam bidang militer terutama *constraint measures*, usaha yang telah dilakukan oleh kedua Korea yaitu menyetujui untuk menghentikan propaganda di sepanjang DMZ. Sejak 15 Juni 2004, Korea Selatan dan Korea Utara secara resmi mengakhiri perang propaganda lewat pengeras suara yang sudah terpasang selama puluhan tahun di sepanjang garis perbatasan kedua Korea. Pertemuan kedua jenderal Korea Selatan dan Korea Utara sespakat untuk mematikan pengeras suara masing-masing. Bukan hanya mematikan pengeras suara namun juga mencopot semua papan iklan yang berbau propaganda yang ada di sepanjang garis perbatasan.

Sejak Perang Korea (1950-1953), puluhan pengeras suara berdaya besar dipasang di sepanjang perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara menggunakan pengeras suara untuk

menyiarkan lagu-lagu perjuangan dan pidato pujian kepada para pemimpinnya. Sebaliknya, Korea Selatan menggemakan lagu-lagu pop dan ceramah-ceramah tentang kebebasan serta demokrasi. Berbagai poster, spanduk dan papan slogan dibersihkan dari kawasan perbatasan. Pemerintah Seoul telah memasang kurang lebih 100 poster, sedangkan pihak Korea Utara memiliki sekitar 200 poster.

Penarikan jumlah pasukan di daerah perbatasan yaitu pasukan Amerika Serikat juga dalam rangka membatasi jumlah personil angkatan bersenjata di DMZ. Hal ini berkaitan erat dengan upaya rekonsiliasi oleh Korea Selatan yaitu dengan menumbuhkan kepercayaan di bidang militer. Tidak lagi mengadakan provokasi, membatasi jumlah persenjataan maupun personil militer di DMZ dapat mendorong bagi terciptanya perdamaian antara keduanya. Adanya saling percaya kedua Korea maka perdamaian yang ingin dicapai di Semenanjung Korea dapat diwujudkan.

Upaya verifikasi didesain untuk mengkonfirmasi atau memastikan pelaksanaan sebuah perjanjian atau persetujuan oleh suatu negara. Misalnya inspeksi wilayah memungkinkan pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan dengan pembatasan penggunaan kekuatan di daerah terlarang, untuk mengkonfirmasi pertukaran data serta memberikan peringatan dini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan potensial konflik.

Verifikasi menjadi lebih penting ketika informasi bersifat sensitif serta perlu diketahui benar tidaknya informasi tersebut. Dalam hubungan antara kedua Korea, verifikasi dapat dilihat dari implementasi ini

verifikasi dapat dilihat dari implementasi terhadap kesepakatan yang akan ditetapkan melalui operasi pengawasan senjata seperti pengumuman dan pengawasan dalam skala besar latihan militer, kegiatan-kegiatan unit juga formasi dan operasi inspeksi kerjasama Utara-Selatan serta mekanisme verifikasi.<sup>24</sup>

Kedatangan tim *International Atomic Energy Agency* (IAEA) setiap tiga bulan sekali membuktikan bahwa Korea Selatan membuktikan sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat internasional yaitu dengan menjadi bagian dari keanggotaan NPT. Korea Selatan menentang keras adanya pengembangan senjata nuklir dan IAEA telah membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak mengembangkan program nuklir dalam bentuk apapun. Pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara juga telah melaksanakan persetujuan pembicaraan tingkat jenderal militer kedua negara yaitu dengan menghentikan propaganda di sepanjang garis perbatasan. Korea Selatan juga menghormati persetujuan gencatan senjata dengan tidak menyerang Korea Utara ataupun melakukan penembakan di DMZ.

Terkait dengan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, usaha verifikasi dalam hal pertukaran informasi mengenai kegiatan militer masing-masing pihak, operasi pengawasan senjata dan lain-lain menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan militer kedua Korea. Sikap Korea Selatan yang secara terbuka menerima kedatangan tim inspeksi IAEA mencerminkan kesungguhan pemerintah Korea Selatan dalam usahanya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea termasuk dalam hubungannya dengan Korea Utara.

Membangun mekanisme kepercayaan militer seperti yang telah diutarakan di atas akan meningkatkan transparansi atau keterbukaan militer dari kedua belah pihak dan kemungkinan untuk dapat memprediksi kegiatan militer dari pihak lain. Hal ini akan mengakibatkan transisi dari fase pengawasan senjata mengambil alih di awal permulaan dan keinginan usaha militer pemerintah dalam hal jaminan militer dapat dengan sukses menetapkan struktur mengurangi ketegangan serta perdamaian di Semenanjung Korea.

Upaya keterbukaan dapat dicapai baik berupa tukar-menukar informasi, menjalin komunikasi, pemberitahuan mengenai aktifitas militer dan pemberian ijin untuk saling melakukan observasi serta inspeksi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. Sikap pemerintah Korea Selatan dalam hal *verification* diperlihatkan dengan dikeluarkannya *white paper* akan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Korea Selatan.<sup>25</sup> Baik itu Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran maupun Kebijakan Pertahanan yang dikeluarkan melalui kementerian terkait. Misalnya Kebijakan Pertahanan oleh Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea (MND) dan Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran oleh Menteri Unifikasi Republik Korea. Adanya keterbukaan informasi akan segala hal yang berkaitan dengan persoalan kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap Korea Selatan, bahkan oleh Korea Utara.

Sebagai bagian dari anggota NPT, pemerintah Korea Selatan sangat mendukung usaha non-proliferasi internasional. Setiap tiga bulan sekali, tim IAEA datang kali untuk membuktikan dan



membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak mengejar dalam bentuk apapun program nuklir. Keterbukaan dalam hubungannya dengan Korea Utara, pemerintah Korea Selatan secara transparan menyebutkan rencana-rencana kegiatan militer yang akan dilakukan. Hal ini dicantumkan dalam Kebijakan Pertahanan Korea Selatan. Tujuan dan program latihan-latihan militer dengan pasukan Amerika Serikat juga dijelaskan secara terbuka.

Dalam rangka upaya rekonsiliasi Korea Selatan terhadap Korea Utara, adanya sikap keterbukaan Korea Selatan terutama dalam hubungan aliansi dengan Amerika Serikat mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap Korea Selatan. Dengan sikap keterbukaan tersebut, Korea Utara dapat melihat dengan jelas maksud dan tujuan Korea Selatan untuk dapat menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea serta menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara secara damai serta menurunkan ketegangan militer antara kedua Korea di DMZ.

### Kesimpulan

Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran ini telah diperluas lagi bukan hanya berlaku bagi Semenanjung Korea namun juga Asia Timur Laut. Presiden Roh tetap berpegang teguh pada sikap menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara dengan damai dan dialog. Rekonsiliasi yang dilakukan untuk menuju perdamaian di Semenanjung Korea melalui keharmonisan, respek, kesatuan, dan kesejahteraan. Mendorong kesamaan kepentingan dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea direalisasikan melalui pembicaraan ataupun dialog dalam menyelesaikan

permasalahan dengan Korea Utara.

Dalam bidang militer, pemerintah Korea Selatan menumbuhkan saling pengertian juga kepercayaan serta mengurangi ketegangan dengan Korea Utara yaitu melalui penerapan CBMs. Pendirian *hotline* menandai sudah adanya sikap saling percaya tersebut terutama dalam hal komunikasi. Pembicaraan untuk pertama kalinya diadakan antara kedua jenderal militer Korea di Gunung Geumgang menjadi tonggak bagi kemajuan positif dalam hal komunikasi terutama untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling percaya antara Korea Selatan-Korea Utara.

### Catatan Akhir

- <sup>1</sup> M. Susan Pederson dan Stanley Weeks, "A Survey of Confidence Building Measures," dalam Ralph A. Cossa, ed., *Asia Pasific Confidence and Security Building Measures*, D.C.: Center for Strategic and International Studies, Washington, 1995, hal. 81
- <sup>2</sup> Kim Jong-Han, "Growth Versus Distribution," *KOREA Now*, 12 Juni 2004, hal. 12.
- <sup>3</sup> Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (terj), PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 132.
- <sup>4</sup> Simon Fisher, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, Zed Books, UK, 2000, hal.132.
- <sup>5</sup> Menteri Unifikasi Republik Korea, "The Policy for Peace and Prosperity," dalam <http://www.unikorea.go.kr> diakses tanggal 5 Desember 2004
- <sup>6</sup> "List For Inter-Korean Dialogue," *Beijing Time* dalam <http://www.english.people.com.cn> diakses tanggal 5 Desember 2004.
- <sup>7</sup> "Rice Aid to North Korea," *KOREA Now*, 12 Juli 2003, hal. 13.
- <sup>8</sup> Andrew Petty, "N.K. to Allow Tours in Gaeseong," *KOREA Now*, 15 Mei 2004, hal. 11.
- <sup>9</sup> "South, North Separated Families Embrace," *KOREA Now*, 12 Juli 2003, hal. 12.
- <sup>10</sup> "Fasilitas Berlebihan, Menjadi Manja dan Sulit Beradaptasi," *Jawa Pos*, 1 Agustus 2004, hal. 3.
- <sup>11</sup> Beijing Time, "DPRK, South Korea Begin Work to Relink North-South Rail, Roads," dalam <http://www.englishpeople.com.cn> diakses tanggal 5

- Relink North-South Rail , Roads," dalam <http://www.englishpeople.com.cn> diakses tanggal 5 Desember 2004.
- <sup>12</sup> Seoul Selection, "Gaeseong Complex, Symbol of Reconciliation," dalam <http://honi.co.kr> diakses tanggal 28 Desember 2004.
- <sup>13</sup> M. Susan Pederson dan Stanley Weeks, *op cit.*, 81-101.
- <sup>14</sup> Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, "Comparison of South and North Korean Military Capabilities," dalam <http://www.mnd.go.kr> diakses tanggal 5 Desember 2004.
- <sup>15</sup> "Meeting the North Korea Nuclear Challenge," dalam [http://nd.edu/~krocinst/ocpapers/op\\_24.pdf](http://nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_24.pdf) diakses 6 Januari 2005.
- <sup>16</sup> Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, "North Korea's Missile Development and Capability," dalam <http://www.mnd.go.kr> diakses tanggal 6 Januari 2005.
- <sup>17</sup> "N. Korea Urges 'Verifiable, Complete Withdrawal' of US Forces in South Korea," *BBC Monitoring International Reports*, 9 Maret 2004.
- <sup>18</sup> Hyun-Jin Seo, "Roh, Bush Seek Diplomacy on Nukes," *KOREA Now*, 27 November 2004, hal. 6.
- <sup>19</sup> Kedutaan Besar Republik Korea, "Roh Says He doesn't Want to See NK to Collapse," dalam <http://www.koreaemb.org> diakses tanggal 6 Januari 2005.
- <sup>20</sup> Beijing Time, "S.Korea,DPRK Reach Agreement on Inter-Korean Railways, Roads," dalam <http://www.english.people.com.cn> diakses tanggal 20 Januari 2005.
- <sup>21</sup> "Two Koreas Set up Military Hotline," dalam <http://china.org.cn> diakses tanggal 27 Desember 2004.
- <sup>22</sup> Sang- Min Joo, "Koreas Agree to Ease Tensions," *KOREA Now*, 12 Juni 2004, hal. 6.
- <sup>23</sup> "Second North-South Korea General Level Military Talks," dalam <http://www.china.cn> diakses tanggal 17 Januari 2005
- <sup>24</sup> Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, *op. cit.*

## Daftar Pustaka

- Fisher, Simon, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, Zed Books, UK, 2000.
- Joo, Sang- Min, "Koreas Agree to Ease Tensions," *KOREA Now*, 12 Juni 2004, hal. 6.
- Kedutaan Besar Republik Korea, "Roh Says He doesn't Want to See NK to Collapse," dalam <http://www.koreaemb.org> diakses tanggal 6 Januari 2005.
- Kim, Jong-Han, Growth Versus Distribution," *KOREA Now*, 12 Juni 2004, hal. 12.
- Menteri Unifikasi Republik Korea, "The Policy for Peace and Prosperity," dalam <http://www.unikorea.go.kr> diakses tanggal 5 Desember 2004
- Miall, Hugh, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer(terj)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, "North Korea's Missile Development and Capability," dalam <http://www.mnd.go.kr> diakses tanggal 6 Januari 2005.
- Pederson, M. Susan dan Stanley Weeks, "A Survey of Confidence Building Measures," dalam Ralph A. Cossa, ed., *Asia Pasific and Security Building Measures*, D.C: Center for Strategic and International Studies, Washington, 1995.
- Petty, Andrew, "N.K. to Allow Tours in Gaeseong," *KOREA Now*, 15 Mei 2004, hal. 11.



Seoul Selection, "Gaeseong Complex, Symbol of Reconciliation," dalam <http://honi.co.kr> diakses tanggal 28 Desember 2004.

[www.english.people.com.cn](http://www.english.people.com.cn) diakses tanggal 20 Januari 2005.

Seo, Hyun-Jin, "Roh, Bush Seek Diplomacy on Nukes," *KOREA Now*, 27 November 2004, hal. 6.

\_\_\_\_\_, "Rice Aid to North Korea," *KOREA Now*, 12 Juli 2003, hal. 13.

\_\_\_\_\_, "South, North Separated Families Embrace," *KOREA Now*, 12 Juli 2003, hal. 12.

\_\_\_\_\_, "Fasilitas Berlebihan, Menjadi Manja dan Sulit Beradaptasi," *Jawa Pos*, 1 Agustus 2004, hal. 3.

\_\_\_\_\_, *Beijing Time*, "DPRK, South Korea Begin Work to Relink North-South Rail, Roads," dalam <http://www.englishpeople.com.cn> diakses tanggal 5 Desember 2004.

\_\_\_\_\_, "Meeting the North Korea Nuclear Challenge," dalam [http://nd.edu/~krocinst/ocpapers/op\\_24.pdf](http://nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_24.pdf) diakses 6 Januari 2005.

\_\_\_\_\_, "N. Korea Urges 'Verifiable, Complete Withdrawal' of US Forces in South Korea," *BBC Monitoring International Reports*, 9 Maret 2004.

\_\_\_\_\_, "Two Koreas Set up Military Hotline," dalam <http://china.org.cn> diakses tanggal 27 Desember 2004.

\_\_\_\_\_, "Second North-South Korea General Level Military Talks," dalam <http://www.china.cn> diakses tanggal 17 Januari 2005.

*Beijing Time*, "S.Korea, DPRK Reach Agreement on Inter-Korean Railways, Roads," dalam <http://>